



Pemilu Dibayangi Krisis Kepercayaan

Pemerintahan yang efektif harus dibangun dengan saling percaya yang kuat antarpolitical politik lewat pemilu.

Asni Harismi

PEMILU 2014 hendaknya bisa dijadikan momentum bagi seluruh partai politik untuk menaruh sikap saling jujur untuk membangun kepercayaan politik (*political trust*) dalam rangka pematangan berpolitik yang demokratis. Demikian salah satu pemikiran yang disampaikan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat berkunjung ke kantor Media Group, Jakarta, kemarin. Hadir dalam kesempatan itu, Presiden PKS Anis Matta, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq, dan Fahri Hamzah serta rombongan. Jika setiap parpol memegang sikap jujur dalam berpolitik, kata Mahfudz Sidik, di masyarakat akan terbangun kepercayaan yang kuat terhadap pemerintahan. Dampak lanjutannya, pemerintahan ke depan akan berjalan efektif dan bisa fokus pada isu-isu pembangunan. Ia berpendapat salah satu elemen untuk membangun *political trust* itu ialah transparansi penghitungan suara pada Pemilu 2014 nanti yang bisa dijadikan perdebatan di publik. Mahfudz berpendapat peng-

alaman pada Pemilu 2009 kurang memperhatikan aspek itu dan hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua partai politik. “Penghitungan suara yang juga berbasis IT sangat rentan untuk diintervensi,” ujarnya. Ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemilu harus berbenah cepat seperti pada penataan data pemilihan, proses penghitungan suara, dan persoalan administrasi lainnya yang tidak kalah pentingnya. Sementara itu, PKS tetap yakin bahwa suara yang akan didulangnya pada Pemilu 2014 akan meningkat meski partai ini sekarang tengah diterpa kasus dugaan suap izin impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathahah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. “Sepanjang pengalaman, gejala menang atau tidak sudah bisa dibaca dari sekarang dan menurut saya kondisi PKS saat ini lebih bagus daripada 2004 dan 2009,” kata Presiden PKS Anis Matta. Ia juga menjelaskan, meski proses hukum Fathahah dan Luthfi masih berlangsung, masalah PKS secara organisasi



KUNJUNGAN PKS: (Dari kiri) Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Abubakar Al Habsyi, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, dan Presiden PKS Anis Matta dalam kunjungan silaturahmi di Media Group, Jakarta, kemarin. Kunjungan tersebut juga membahas persiapan PKS dalam menghadapi Pemilu 2014.

sudah tidak ada lagi. Sebab masalah PKS sudah menyerahkan semua perkara tersebut ke lembaga hukum terkait untuk memproses keduanya sebagai individu. “Kami membela organisasi. Kita serahkan semua ke hukumnya karena kami merasa persoalan organisasi sudah selesai,” imbuh Anis.

Kendati demikian, Anis tidak menampik bahwa perkara kasus suap perizinan impor daging sapi itu sempat membuat pimpinan PKS ketar-ketar akan hancurnya partai. Namun, setelah ia melakukan survei di 14 provinsi, yang terjadi justru citra partai terutama di mata kadernya masih baik. Selain hal-hal itu, kepercayaan

diri PKS juga lahir dari empat hal. Yaitu jangkauan struktur lebih bagus dan merata ke semua daerah, kader lebih banyak, lebih banyak ikon partai, serta kemampuan mereka mengoptimalkan dana kampanye. Sementara itu, ketika diminta konfirmasi mengenai keinginan partai untuk keluar dari koalisi, Anis mengindikasi-

kan bahwa wacana itu tidak ada. Hal tersebut merupakan jawaban atas memanasnya hubungan PKS dengan Partai Demokrat yang banyak kadernya juga tengah tersandung kasus Hambalang. “Kita sekarang bekerja dan tidak menganggap keikutsertaan di koalisi sebagai faktor pertimbangan,” ujarnya.

Pernyataan itu juga diungkapkan setelah kata-kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah yang ingin partainya keluar dari koalisi karena ketidakseimbangannya dengan gaya kepemimpinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (P-2)

asni@mediaindonesia.com

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden

DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo mengatakan pemerintah melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika membiarkan RUU Pemda masih memakai substansi UU Pemda, yang dinilai menghalangi penegak hukum untuk menindak kepala daerah yang diduga melakukan korupsi, pencucian uang, dan atau penyalahgunaan wewenang. “Putusan MK No 73/PUU-IX/2011 menetapkan bahwa persetujuan tertulis dari presiden pada tahap penyelidikan dan penyidikan kepala daerah



MENGUBAH RUU PEMDA: Gubernur Riau Rusli Zaenal memberikan keterangan sesuai di periksa KPK di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) karena dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari Presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka.

tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, sehingga menyatakan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32/2004 inkonstitusional, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum,” jelas Dian di Jakarta, kemarin.

Ia juga beranggapan bahwa izin presiden tidak memiliki rasionalitas hukum cukup dan akan memperlakukan warga negara berbeda di mata hukum. Oleh karena itu, ada kekhawatiran pejabat yang diduga terlibat kasus hukum

akan berusaha dengan berbagai cara agar permohonan izin pemeriksaan dari presiden tidak keluar, baik dengan menghadang di tingkat penyidik maupun pada tingkat lainnya. “Dengan adanya putusan MK itu, seharusnya pemerintah menaati dan melaksanakannya. Karena kalau tidak, itu artinya pemerintah malah melanggar konstitusi,” tandas Dian. Sementara itu, DPR dan pemerintah juga akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pemilu Kada dan akan menyepakati mekanisme dan formulasi penyelenggaraan pemilu kada serentak. “Hingga menjelang akhir masa persidangan kedua pada April lalu, fraksi-fraksi sudah menyepakati penyelenggaraan pemilu kada secara serentak, tapi mekanisme dan formulasinya yang masih belum bulat,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunajjar Sudarsa pada diskusi bertajuk Dialog Kenegaraan: Pilkada Serentak untuk Kesejahteraan Daerah, yang diselenggarakan DPD, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. (AN/P-3)

DPR dan Bawaslu Sepakat Tempatkan Pengawas di Setiap TPS

Keberadaan pengawas di setiap TPS lebih menjamin terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

KOMISI II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu 2014 diawasi seorang pengawas pemilu. Adapun selama ini, saksi di TPS hanya berasal dari parpol peserta pemilu. “Ya, untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014, DPR setuju dengan adanya satu pengawas dari Bawaslu di setiap TPS. Selanjutnya Komisi II meminta kepada Bawaslu untuk melengkapi persyaratan dan permohonan dalam pembicaraan pendahuluan dalam RAPBN 2014,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunadjar Sudarsa sesuai rapat dengar pendapat dengan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Lebih lanjut Agun menjelaskan kelengkapan persyaratan serta desain mekanisme dan fungsi kehadiran pengawas di setiap TPS perlu segera diajukan Bawaslu. Akan tetapi, yang pasti, kehadiran pengawas itu akan memberi dam-

pak positif bagi jalannya pemilu yang luber dan jujur. “Kelengkapan persyaratan itu semacam proposal atau *term of reference* yang di dalamnya antara lain berisi mekanisme kerjanya, pengawasannya, dan sistemnya. Kami minta itu disiapkan Bawaslu. Tentu implikasinya pada kebutuhan pembiayaan dalam RAPBN 2014,” jelasnya. Politikus Golkar itu menambahkan, karena nota keuangan sudah disampaikan dan pengantar di Bandan Anggaran DPR juga sudah dibicarakan, selanjutnya Komisi II akan membawa kesepakatan

itu dalam rapat-rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR, sampai pada penetapan di rapat paripurna. Saat menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan keberadaan pengawas pemilu di setiap TPS diharapkan bisa menjawab permasalahan pemilu selama ini yang terkesan penuh kecurangan. “Problem mendasar kita mudah-mudahan di tiap TPS ada pengawas pemilu. Itu yang paling aman dan efektif mengamankan formulir C1 sebagai data yang paling valid,” ungkapnya. Menurutnya, bila formulir C1 tidak bisa didapatkan, akan kesulitan untuk menghubungi saksi partai yang bertugas di TPS. “Semoga dengan adanya keputusan politik hari ini, ada petugas pemilu yang kami sebut sebagai mitra pemilu yang akan menjemput dan mengamankan formulir C1, dan memastikan angkanya sama seperti yang dipegang KPPS dan saksi partai. Insya Allah kita kawal dari hulu,” tandas Muhammad. (AN/P-3)

Utak-atik Berkas hingga di Lobi Kantor KPU

JARUM jam menunjukkan tepat pukul 12.00 WIB. Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, semakin ramai. Partai politik silih berganti datang membawa kotak-kotak besar dalam jumlah banyak untuk diserahkan ke KPU. Maklum, kemarin merupakan hari terakhir bagi parpol peserta pemilu untuk mengembalikan berkas pengembalian bakal calon anggota legislatif (caleg). Dari 12 parpol (nasional) peserta Pemilu 2014, hanya satu partai, yakni PDIP yang menyerahkan berkas

perbaikan pada 21 Mei lalu. Adapun 11 parpol lainnya baru menyerahkan pada hari terakhir, kemarin. Secara berurutan mereka tiba di Gedung KPU mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB. Diawali oleh PBB, lalu Golkar, PKPI, Demokrat, PKB, Hanura, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Partai NasDem. Karena pengembalian menumpuk di hari terakhir, proses verifikasi pun menjadi sangat sibuk. Bayangkan, satu tim verifikasi KPU yang mendata per partai hanya 3-4 orang. Mereka harus memeriksa kelengkapan

secara teliti lembar per lembar. Petugas KPU harus berpacu dengan waktu mengingat batas pengembalian berkas hanya sampai pukul 24.00 WIB, tadi malam. Setiap parpol rata-rata datang ke KPU diwakili lima orang. Mereka masuk ke ruangan tertutup dan bersama petugas KPU sibuk membolak-balik berkas bakal caleg. Bahkan, kesibukan tidak hanya terjadi dalam ruangan verifikasi, tetapi juga di luar ruangan, di lobi KPU. Pasalnya, ada parpol yang datang tapi belum siap dengan semua dokumen yang

diperlukan. Partai Hanura, misalnya, tiba di Gedung KPU pukul 13.40 WIB dengan membawa 9 boks plastik berisi berkas bakal caleg. Mereka masuk ke Gedung KPU dan diterima petugas verifikasi, tetapi tidak langsung menyerahkan berkas untuk diperiksa. Ada empat perempuan yang sibuk memasukkan fotokopi bertuliskan daftar caleg DPR ke setiap map persyaratan bakal caleg. Partai Bulan Bintang (PBB) pun setali tiga uang. Ada enam perempuan duduk di lantai sambil menyusun berkas, men-staples, lalu

memasukkan ke map. Bahkan, ada yang *menipeks* dan menuliskan nama calon di depan map berisi berkas bakal caleg. Begitu juga dengan PKPI. Kepanikan parpol seharusnya tidak perlu terjadi bila mereka mempersiapkan diri secara baik dan tidak memilih hari terakhir baru mengembalikan berkas. Mudah-mudahan parpol dan KPU bisa mengambil hikmah dari berbagai persoalan yang dihadapi selama ini sehingga tahapan pemilu ke depan dapat berjalan lebih mulus. (Raja Eben Lubis/P-3)



PENGEMBALIAN BERKAS: Kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) membawa berkas perbaikan bakal caleg di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. KPU memberikan kesempatan bagi parpol untuk mengembalikan berkas bacaleg hingga kemarin.